

ISSN : 1412-5331

MAJALAH ILMIAH
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEMARANG

S O L U S I

Vol. 9 No. 3 Juli 2010

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Metode Akuntansi
Persediaan pada Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2005-2008

Dwi Heryani, Dian Indudewi

Impor Beras dalam Pandangan Islam
Ngatindriatun, Hertiana Ikasari

Persepsi Akuntan Publik, Akuntan Pendidik dan
Mahasiswa Akuntansi terhadap Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia
Widyawati, Setyo Bhagasworo, Ardiani Ika S.

Intellectual Capital sebagai Keunggulan Kompetitif Perusahaan
Amerti Irvin Widowati

Hubungan antara *Job Satisfaction* dengan
Organizational Commitment Guru DPK
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas di Kabupaten Banyumas
Agus Sunarmo

Analisis Underpricing di Pasar Sekunder Bursa Efek Indonesia
Bernadeta Septi W., Paulus Wardoyo

Pemasaran dalam Pelayanan Kesehatan
melalui Iklan dan Promosi
Andy Kridasusila

Upaya Pemerintah Meningkatkan Pendapatan
Petani Tembakau melalui Alokasi Dana Cukai Tembakau
Dian Prawitasari

Sharia Lending Model untuk Pengentasan Kemiskinan
Melalui Pemberdayaan Pedagang di Pasar Tradisional
Kabupaten Banyumas
*Permata Ulfah, Wiwiek Rabiatus Adawiyah,
Umi Pratiwi, Poppy Dian IK*

Corporate Governance dalam Pengungkapan
Corporate Social Responsibility (CSR) pada Bank Syariah
Andi Irfan

SOLUSI

Vol. 9 No. 3 Juli 2010

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Metode Akuntansi
Persediaan pada Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2005-2008
Dwi Heryani, Dian Indudewi

Impor Beras dalam Pandangan Islam
Ngatindriatun, Hertiana Ikasari

Persepsi Akuntan Publik, Akuntan Pendidik dan
Mahasiswa Akuntansi terhadap Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia
Widyawati, Setyo Bhagasworo, Ardiani Ika S.

Intellectual Capital sebagai Keunggulan Kompetitif Perusahaan
Amerti Irvin Widowati

Hubungan antara *Job Satisfaction* dengan
Organizational Commitment Guru DPK
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas di Kabupaten Banyumas
Agus Sunarmo

Analisis Underpricing di Pasar Sekunder Bursa Efek Indonesia
Bernadeta Septi W., Paulus Wardoyo

Pemasaran dalam Pelayanan Kesehatan
melalui Iklan dan Promosi
Andy Kridasusila

Upaya Pemerintah Meningkatkan Pendapatan
Petani Tembakau melalui Alokasi Dana Cukai Tembakau
Dian Prawitasari

Sharia Lending Model untuk Pengentasan Kemiskinan
Melalui Pemberdayaan Pedagang di Pasar Tradisional
Kabupaten Banyumas
*Permata Ulfah, Wiwiek Rabiatal Adawiyah,
Umi Pratiwi, Poppy Dian IK*

Corporate Governance dalam Pengungkapan
Corporate Social Responsibility (CSR) pada Bank Syariah
Andi Irfan

SOLUSI

Mengkaji masalah-masalah sosial, ekonomi dan bisnis
Terbitan 3 bulan sekali
(Januari, April, Juli, Oktober)

Penerbit :
Fakultas Ekonomi Universitas Semarang

Pelindung :
Rektor Universitas Semarang

Penanggungjawab :
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Semarang

Dewan redaksi :
Prof. Dr. Pahlawansjah Harahap, SE, ME (USM)
Prof. Dr. Imam Ghozali M.Com, Hons.Akt (UNDIP)
Prof. Supramono SE, MBA, DBA(UKSW)
Prof. Dr. Dra. Sulastri ME. M.kom (UNISRI)
Dr. Ir. Kesi Widjanti SE MM (USM)

Redaktur Pelaksana :
Andy Kridasusila SE MM
Ardiani Ika S., SE MM Akt
Adijati Utaminingsih SE MM

Sekretaris Redaksi :
Amerti Irvin Widowati SE MSi Akt

Tata Usaha :
Ali Arifin

Alamat Penerbit/Redaksi :
Jl. Soekarno Hatta (Tlogosari)
Telp. (024) 6702757, Fax. (024) 6702272
SEMARANG – 50196

Terbit Pertama kali : Juli 2002

KATA PENGANTAR

Sungguh merupakan kebahagiaan tersendiri bagi kami, tatkala kami dapat hadir rutin setiap 3 bulan sekali untuk saling bertukar pikiran mengenai hal-hal baru di bidang ilmu ekonomi baik manajemen, akuntansi maupun studi pembangunan.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pembaca, pengirim artikel yang antusias untuk melakukan tukar pikiran dan berkomunikasi melalui media ini. Sekiranya hal ini dapat dipertahankan, maka selain kehadiran kami akan selalu dapat terlaksana dengan tepat waktu dan artikel yang beragam, wawasan pembaca juga akan semakin luas.

Penerbitan majalah ilmiah SOLUSI kali ini menghadirkan 10 (sepuluh) artikel yang telah kami anggap layak untuk diterbitkan, dengan harapan artikel-artikel ini dapat menjadi tambahan referensi bagi para pembaca dan menjadi sumbangan kami terhadap dunia ilmu pengetahuan khususnya bidang ilmu ekonomi bagi pengembangan organisasi swasta maupun institusi pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Hormat kami,

Redaksi

DAFTAR ISI

1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Metode Akuntansi Persediaan pada Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2005-2008	1 - 8
<i>Dwi Heryani, Dian Indudewi</i>	
2. Impor Beras dalam Pandangan Islam	9 - 17
<i>Ngatindriatun, Hertiana Ikasari</i>	
3. Persepsi Akuntan Publik, Akuntan Pendidik dan Mahasiswa Akuntansi Terhadap Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia	19 - 25
<i>Widyawati, Setyo Bhagasworo, Ardiani Ika S.</i>	
4. Intellectual Capital sebagai Keunggulan Kompetitif Perusahaan.....	27 - 32
<i>Amerti Irvin Widowati</i>	
5. Hubungan antara Job Satisfaction dengan Organizational Commitment Guru DPK Sekolah Lanjutan Tingkat Atas di Kabupaten Banyumas	33 - 43
<i>Agus Sunarmo</i>	
6. Analisis Underpricing di Pasar Sekunder Bursa Efek Indonesia	45 - 63
<i>Bernadeta Septi W., Paulus Wardoyo</i>	
7. Pemasaran dalam Pelayanan Kesehatan melalui Iklan dan Promosi	65 - 72
<i>Andy Kridasusila</i>	
8. Upaya Pemerintah Meningkatkan Pendapatan Petani Tembakau melalui Alokasi Dana Cukai Tembakau	73 - 79
<i>Dian Prawitasari</i>	
9. <i>Sharia Lending Model</i> untuk Pengentasan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Pedagang di Pasar Tradisional Kabupaten Banyumas	81 - 92
<i>Permata Ulfah, Wiwiek Rabiatal Adawiyah, Umi Pratiwi, Poppy Dian IK</i>	
10. <i>Corporate Governance</i> dalam Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CRS) pada Bank Syariah	93 - 105
<i>Andi Irfan</i>	

Impor Beras dalam Pandangan Islam

Oleh :

Ngatindriatun

Hertiana Ikasari

Dosen FE Universitas Dian Nuswantoro Semarang

Pendahuluan

Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang paling utama, karena itu pemenuhan pangan merupakan bagian dari hak asasi individu. Pemenuhan pangan juga sangat penting sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Mengingat pentingnya memenuhi kecukupan pangan, setiap negara akan mendahulukan pembangunan ketahanan pangannya sebagai fondasi bagi pembangunan sektor-sektor lainnya.

Tujuan pembangunan ketahanan pangan adalah menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional, daerah hingga rumah tangga. Ketahanan pangan harus diwujudkan secara merata di seluruh wilayah sepanjang waktu, dengan memanfaatkan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal. Mengingat pangan juga merupakan komoditas ekonomi, maka pembangunannya dikaitkan dengan peluang pasar dan peningkatan daya saing, yang dibentuk dari keunggulan spesifik lokasi, keunggulan kualitas serta efisiensi dengan penerapan teknologi inovatif. Selanjutnya karena produksi pangan nasional sebagian besar dilaksanakan oleh petani dengan skala usaha kecil masyarakat miskin di pedesaan, maka pembangunan ketahanan pangan sangat strategis untuk memperkuat ekonomi pedesaan dan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.

Pendefinisian ketahanan pangan (*food security*) berbeda dalam tiap konteks, waktu dan tempat. Sedikitnya ada 200 definisi ketahanan pangan dan sedikitnya ada 450 indikator ketahanan pangan. Menurut FAO, ketahanan pangan adalah situasi di mana semua orang dalam segala waktu memiliki kecukupan jumlah atas pangan yang aman (*safe*) dan bergizi demi kehidupan yang sehat dan aktif. Menurut UU No.7/ 1996, ketahanan pangan adalah kondisi di mana terjadinya kecukupan penyediaan pangan bagi rumah tangga yang diukur dari ketercukupan pangan dalam hal jumlah dan kualitas dan juga adanya jaminan atas keamanan (*safety*), distribusi yang merata dan kemampuan membeli.

Di Indonesia aspek ketahanan pangan (*food security*) telah menjadi isu sentral dalam pembangunan pertanian dan pembangunan nasional. Masalah pangan dan ketahanan pangan tidak dapat dilepaskan dari konteks komoditas beras. Hal ini mengingat beras merupakan bahan pangan pokok (*staple food*) yang dikonsumsi oleh hampir seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian ketersediaan beras menjadi faktor penting dalam memantapkan ketahanan pangan nasional.

Penduduk Indonesia hampir 96 % makan beras daripada sumber pangan lainnya, sehingga setiap gejolak harga beras sangat berdampak bagi pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Laporan paling akhir BPS tentang kemiskinan menyatakan bahwa setiap bulannya pengeluaran yang dilakukan oleh penduduk di bawah garis kemiskinan (pengeluaran per bulan di bawah Rp. 152.847,00) untuk membeli beras mencapai 23,10 % dari uang yang mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga setiap kenaikan harga beras berimplikasi pada bertambahnya porsi pengeluaran penduduk untuk mendapatkannya. Artinya kenaikan harga beras apalagi dengan tingkat yang tinggi menurunkan kemampuan penduduk yang berpenghasilan rendah dan miskin untuk hidup layak. Menurut ukuran BPS, penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan pada bulan Maret 2007 berjumlah 39,05 juta jiwa (17,75 %).

Ancaman terhadap ketahanan pangan disebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara jumlah produksi dan konsumsi pangan. Jumlah konsumsi beras di Indonesia tampaknya akan sulit ditekan karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengandalkan beras sebagai makanan pokok. Bila konsumsi tidak dapat ditekan sementara jumlah produksi beras di tingkat nasional menurun, maka situasi demikian akan memperburuk ketahanan pangan nasional. Namun sesungguhnya, berkurangnya jumlah produksi beras tidak otomatis menjadi ancaman terhadap ketahanan pangan selama mampu mengimpor beras dari luar negeri.

Namun permasalahannya, dalam situasi perekonomian yang tidak menentu seperti sekarang ini, mengimpor beras bukanlah persoalan yang mudah. Selain merugikan petani lokal, dampak psikologis karena Indonesia pernah dikenal dunia internasional sebagai negara yang pernah berswasembada beras, juga disebabkan oleh masalah devisa. Mengimpor beras dari luar negeri membuat pemerintah harus memiliki cadangan devisa yang besar. Cadangan devisa akhirnya menjadi faktor yang menentukan karena untuk mendatangkan beras impor tidak dapat menggunakan rupiah. Merosotnya nilai rupiah jelas akan memperburuk posisi daya beli Indonesia terhadap komoditas yang diimpor. Aksesibilitas terhadap pasar internasional yang terus berkurang pada gilirannya akan mengancam ketahanan pangan di tingkat nasional. Menipisnya cadangan devisa, stagnannya produksi beras serta masalah aksesibilitas terhadap pasar merupakan sebagian dari banyak persoalan yang berpotensi besar terhadap ancaman ketahanan pangan di tingkat nasional.

Menurut Amang dan Sawit (2001) kebijaksanaan impor beras yang berlebihan mengandung sejumlah resiko dalam mempertahankan kemandirian dan kekuatan sesuatu negara. Pangan dapat dijadikan alat politik untuk menekan suatu negara oleh negara besar atau oleh negara pesaing, misalnya melalui embargo pangan. Apalagi upaya pemenuhan beras yang berasal dari impor bukanlah pekerjaan mudah. Hal ini karena volume beras yang diperdagangkan di pasar dunia relative kecil yaitu sebesar 15 juta ton atau sebesar 4-5 persen dari total produksi dunia sekitar 350 juta ton beras. Dari 15 juta ton beras tersebut sebagian besar sudah memiliki pembeli (negara-negara di Amerika Latin, Afrika, Timur Tengah dan juga Asia), sehingga bila Indonesia masuk ke pasar beras dunia dengan satu sampai dua juta ton akan mengakibatkan guncangan harga beras di pasar dunia.

Kontroversi impor beras menjadi permasalahan yang biasa setiap tahun, semenjak swasembada pangan tidak mampu dicapai Indonesia. Impor ini memang dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan pangan dari kekurangan produksi dalam negeri, serta untuk menyangga stok pangan nasional dengan berbagai alasan. Tetapi impor beras dalam jumlah yang besar dan berkelanjutan sangat tidak diharapkan karena dilihat dari berbagai segi sangat tidak menguntungkan.

Tujuan penulisan makalah ini adalah menyajikan tinjauan kritis terhadap masalah impor beras dalam jumlah besar akhir-akhir ini dikaitkan dengan peranan komoditas beras yang sangat strategis dalam memantapkan ketahanan pangan nasional dari sudut pandang Islam. Dari hasil analisis diharapkan memberikan alternatif kebijakan untuk mengantisipasi permasalahan yang akan muncul. Metode penulisan makalah adalah mengkaji kepustakaan (*review*) dari berbagai sumber seperti buku-buku dan tulisan lain, majalah, surat kabar, hasil-hasil pengkajian dan sebagainya.

Kebijakan Pangan Indonesia

Kebijakan harga beras telah menjadi basis kebijakan pangan dan beras lebih dari 300 tahun, sejak masa kolonial. Tetapi permasalahannya, dari kebijakan harga pangan hari ini sangat berbeda dengan asal muasalnya. Pemerintah kolonial Belanda selalu menginginkan harga buruh yang murah bagi investasi pertaniannya di nusantara. Karena itu, harga dasar pangan dan beras selalu ditekan rendah, karena harga beras sangat penting bagi konsumsi keluarga, sehingga perlu membuat harga dasar pangan utama tersebut rendah sepanjang waktu (Mears dan Moelyono dalam Jonatan Lassa, 2006).

Presiden Sukarno mencontoh kebijakan yang sama dengan motivasi dukungan politik. Sukarno ingin melindungi kekuasaannya dengan cara mengambil hati pegawai negeri sipil dan militer dengan cara proteksi pendapatan melalui beras sebagai komponen gaji bulanan. Tujuannya yakni rezim yang belia memerlukan kesetiaan dengan dukungan politik (Mears dan Moelyono dalam Jonatan Lassa, 2006).

Masa pemerintahan rejim Suharto selama 32 tahun secara telak menjiplak hal yang sama. Bisa dibayangkan dukungan beras untuk memberi makan 4,6 juta PNS dan 0,5 juta militer akan berdampak pada hasil voting dalam pemilu. Kondisi menjadi lebih buruk ketika beras dianggap menjadi barometer ekonomi pembangunan tapi pada saat yang sama berfungsi sebagai alat politik (Mears dan Moelyono dalam Jonatan Lassa, 2006).

Kelahiran Badan Urusan Logistik (BULOG) tahun 1967, sejak awal diproyeksikan untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia melalui dua mekanisme : stabilisasi harga beras dan pengadaan bulanan untuk PNS dan militer. Bulog berfungsi sebagai pengatur harga beras domestik secara signifikan lebih tinggi dari harga beras dunia. Hal ini masih menjadi kebijakan Megawati hingga tahun 2004 (Mears dan Moelyono dalam Jonatan Lassa, 2006).

Kondisi ini diperparah lagi dengan korupsi di tubuh Bulog. Simatupang (1995) menuduh kebijakan pangan Indonesia sebagai praktek *kleptocracy*, yang berarti bahwa rezim Suharto menggunakan Bulog sebagai mesin uang bagi kepentingan pribadi dan keuntungan politis. Akhir 1980, Bulog tetap ditugasi untuk memerankan kontrol pasar perberasan Indonesia tetapi sedikit diperluas untuk menangani komoditas pangan lain seperti gula pasir, gandum, jagung, kedelai dan sejumlah komoditas lainnya (Mears dan Moelyono dalam Jonatan Lassa, 2006).

Tabel 1 menunjukkan bahwa Indonesia berupaya mencapai swasembada pangan sejak 1952 hingga hari ini. Pencapaian swasembada pangan 1984 tidak mampu dijaga secara berkelanjutan. Yang perlu dicatat adalah upaya mencapai swasembada pangan tidak disertai oleh upaya penguatan ketahanan pangan (Mears dan Moelyono dalam Jonatan Lassa, 2006).

Susilo Bambang Yudoyono (SBY) gencar mempromosikan "revitalisasi pertanian", dengan upaya mencapai swasembada beras maupun non-beras. Melalui pengarus-utamaan dengan alternatif seperti jagung, singkong, disamping beras. Karena itu di atas kertas, ada peningkatan kualitas kebijakan dibandingkan rezim kepresidenan sebelumnya. Revitalisasi pertanian termasuk di dalamnya juga pembangunan sektor agribisnis demi terciptanya nilai tambah komoditas agribisnis demi pendapatan dan akses atas pangan yang lebih baik (Mears dan Moelyono dalam Jonatan Lassa, 2006).

Tabel 1. Sejarah Kebijakan Pangan Indonesia

Orde	Rezim Pemerintahan	Kebijakan Pangan	Catatan
Orde Lama (Paska Kemerdekaan)	Soekarno 1952-1956	Swasembada Beras melalui Program Kesejahteraan Kasimo	1950-1952: BAMA (Yayasan bahan Makanan) 1953-1956: YUBM (Yayasan Urusan Bahan Makanan)
	Soekarno	Swasembada Beras melalui Program Sentra Padi	1956: YBPP (Yayasan Badan pembelian Padi) 1964: PP No. 3- <i>Food Material Board</i> 1964: Bimas dan Panca `Usaha Tani
Pemerintahan Transisi 1965-1967			1966: Komando Logistik Nasional (KOLOGNAS) 1967: Dibubarkannya KOLOGNAS 1967: BULOG didirikan dan berfungsi sebagai pembeli beras tunggal
Orde Baru (Orde Pembangunan)	Soeharto Repelita 1&2 1969-1979	Swasembada Beras	1969: Tambahan tugas Bulog: Manajemen Stok penyangga pangan nasional-an penggunaan neraca pangan nasional sebagai standar ketahanan pangan. 1971: Tambahan tugas Bulog sebagai pengimpor gula dan gandum 1973: Lahirnya serikat petani Indonesia 1974: Tambahan tugas Bulog: Pengadaan daging untuk DKI Jakarta 1974: Penggunaan Revolusi Hijau untuk mencapai swasembada beras

			1977: Tambahan tugas Bulog: kontrol impor kacang kedelai. 1978: Penetapan harga dasar jagung, kedelai, kacang tanah dan kacang hijau.
	Soeharto Repelita 3&4 1979-1989	Swasembada Pangan	1978: Keppres 39/ 1978, Pengembalian tugas Bulog sebagai control harga untuk gabah, beras, tepung gandum, gula pasir, dll 1984: Medali dari FAO atas tercapainya Swasembada Pangan
	Soeharto Repelita 5,6, 7 1989-1998	Swasembada beras	1995: Penganugerahan pegawai Bulog sebagai PNS 1997: Perubahan fungsi Bulog untuk mengontrol hanya harga beras dan gula pasir. 1998: Penyempitan peran Bulog yang berfungsi sebagai pengontrol harga saja
Reformasi (Transisi)	Habibi 1998/ 1999	Swasembada Beras	1998/ 1999: Penjualan pesawat IPTN yang ditukar dengan beras Thailand
	Abdurrahman Wahid 1999/2000	Swasembada Beras	2000: Penugasan tugas Bulog untuk management logistik beras (penyediaan, distribusi dan kontrol harga)
Reformasi (Setelah 2000)	Megawati 2000/ 2004	Swasembada Beras	2003: Privatisasi Bulog 2004: <i>No-Option Strategy</i> kecuali swasembada beras
	SBY 2004-2009	Revitalisasi Pertanian	2005: Revitalisasi pertanian-komitmen (janji) untuk meningkatkan pendapatan pertanian untuk GDP, pembangunan agribisnis yang mampu menyerap tenaga kerja dan swasembada beras, jagung serta palawija

Sumber: Mears dan Moelyono dalam Jonatan Lassa, 2006

Perkembangan Impor Beras

Indonesia pernah mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Namun sejak swasembada beras diraih, laju pertumbuhan produksi beras nasional cenderung menurun dan semakin tidak stabil sehingga sejak tahun 1994, Indonesia sudah tidak lagi berswasembada beras. Dengan pola produksi beras yang melandai (*leveling off*) maka produksi beras dalam negeri semakin tidak dapat diandalkan sebagai sumber utama penyediaan pangan nasional sehingga menyebabkan impor beras berkelanjutan dengan volume yang terus meningkat. Perkembangan impor beras pada periode 1985-1993 (periode swasembada) rata-rata mencapai 0,16 juta ton/ tahun, dan pada periode 1994-1997 (periode setelah tidak berswasembada beras sampai dengan sebelum krisis ekonomi) meningkat menjadi rata-rata 1,10 juta ton/ tahun, dan periode 1998-2000 (periode krisis) meningkat lebih besar menjadi 4,65 juta ton/ tahun. Perkembangan volume impor beras periode 1985-2000 dapat dilihat pada Tabel 2.

Kini Indonesia merupakan negara *net importer* beras terbesar di dunia. Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) menyebutkan tahun 2002 lima Negara pengimpor beras terbesar di dunia yaitu Indonesia (3,25 juta ton), Nigeria (1,7 juta ton), Iran (1,5 juta ton), Filipina (1,2 juta ton) dan Irak

(1,1 juta ton). Pada tahun 2001, Indonesia menjadi Negara pengimpor beras nomor dua setelah Nigeria.

Prediksi USDA yang terbaru menunjukkan Indonesia masih menjadi pengimpor beras terbesar. Prediksi impor beras ini masih sama besar dengan prediksi USDA tahun 2002. Prediksi impor impor beras menurut Pusat Studi Pembangunan (PSP-IPB) untuk tahun 2003 sekitar 2,3 juta ton. Meskipun perhitungan PSP_IPB ini lebih kecil dari USDA, namun impor beras tersebut masih tergolong besar.

Tabel 2. Perkembangan Impor Beras 1985-2006

No	Tahun	Impor	Keterangan
1	1985	0	Rata-rata impor beras: 1985-1993 : 0,16 juta ton 1994-1997 : 1,10 juta ton 1998-2000 : 4,65 juta ton
2	1986	0	
3	1987	120	
4	1988	0	
5	1989	464	
6	1990	30	
7	1991	179	
8	1992	634	
9	1993	0	
10	1994	876	
11	1995	3014	Sejak September 1998, impor beras bebas dilakukan swasta (importir umum)
12	1996	1090	
13	1997	407	
14	1998	7100	
15	1999	5044	
16	2000	1800	
17	2001	68,737	
18	2002	1,000,586	
19	2003	655,126	
20	2004	29,350	
21	2005	68,800	
22	2006	291,872	
	Rata-rata		

Sumber: Simatupang, et.al (1999), (1985-1997); Erwidodo, et.al (1999), 1985-1997; Surono (2001), 1992-1999; dan Amang dan Sawit (2001), 1990 – 2000

Politik Pangan Islam

Bergejolaknya harga beras pada dasarnya disebabkan oleh tidak tercukupinya pasokan beras ke masyarakat dan macetnya distribusi beras atau disebabkan oleh kedua faktor tersebut. Bila permasalahan melonjaknya harga beras disebabkan oleh kurang pasokan beras yang mungkin disebabkan oleh produksi beras petani lokal tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat maka langkah yang ditempuh oleh Negara adalah lebih menguatkan dan mendisiplinkan politik pertanian agar tercapai produktifitas pertanian yang tinggi. Dalam kondisi darurat sepanjang tidak menyebabkan kerugian petani lokal di mana tidak ada pilihan lain lagi kecuali harus mendatangkan bahan pangan dari luar maka pemerintah harus melakukan kebijakan impor beras. Impor beras dilakukan pemerintah semata-mata untuk memenuhi kebutuhan rakyat bukan untuk berbisnis.

Bila naiknya harga beras disebabkan oleh masalah distribusi, maka harus dilihat penyebabnya yakni apakah disebabkan oleh faktor fisik seperti rusaknya jalan dan tiadanya sarana transportasi yang memadai ataukah karena permainan spekulan yang menimbun beras. Bila penyebabnya masalah yang pertama, maka yang harus dilakukan pemerintah adalah segera memperbaiki jalan dan sarana transportasi yang rusak tersebut. Bila penyebabnya karena penimbunan beras, maka pemerintah secepatnya mengembalikan beras yang ditimbun oleh pedagang spekulan tersebut dan memberikan hukuman setimpal terhadap para pelakunya. Perbuatan menimbun beras hukumnya mutlak haram sebab Rasulullah SAW telah melarang manusia melakukan penimbunan bahan makanan dan menyatakan perbuatan tersebut adalah salah.

Abdurrahman al-Maliki dalam Muttaqin (2007) menyatakan pertanian merupakan salah satu sumber primer ekonomi di samping perindustrian, perdagangan dan tenaga manusia (jasa). Dengan demikian pertanian merupakan salah satu pilar ekonomi yang mana bila permasalahan pertanian tidak dapat dipecahkan dapat menyebabkan goncangnya perekonomian, bahkan akan membuat suatu negara menjadi lemah dan berada dalam ketergantungan pada negara lain.

Dalam bidang pertanian Indonesia dan negara-negara berkembang terperangkap dalam jebakan negara-negara maju dalam bentuk perdagangan bebas dan pasar bebas yang dinaungi oleh organisasi *World Trade Organization (WTO)*. Negara-negara berkembang didesak oleh negara-negara maju agar membuka pasar dalam negeri mereka dengan menghilangkan proteksi pertanian nasional baik dengan pencabutan subsidi maupun dengan penghapusan hambatan tarif. Sebaliknya negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Jerman dan Perancis melakukan proteksi luar biasa terhadap para petani mereka dalam bentuk subsidi, hambatan tarif dan halangan-halangan impor lainnya. Negara-negara maju tersebut menyadari betapa pentingnya pertanian bagi perekonomian dan vitalnya ketahanan pangan untuk kemandirian Negara.

Bagi Negara khilafah, politik pertanian mutlak adanya agar potensi dan kekuatan khilafah bisa digali dalam rangka menciptakan pemerintah yang mampu memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara mandiri sebagai wujud dari memelihara dan mengatur urusan umat. Menurut al-Maliki dalam Muttaqin (2007), politik pertanian merupakan kebijakan pertanian untuk mencapai produksi pertanian yang tinggi. Untuk menciptakan produksi pertanian yang tinggi digunakan dua metode yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi.

Intensifikasi merupakan usaha untuk meningkatkan produksi tanah, termasuk menciptakan bibit tanaman unggul dan berkualitas. Untuk mencapai intensifikasi yang optimal negara harus mendorong dan membiayai riset pertanian yang bertujuan menghasilkan bibit tanaman unggul dan berkualitas, dan riset yang mengarahkan kepada peningkatan kesuburan tanah atau kesuburan media menanam tanaman pangan lainnya, juga menciptakan pupuk dan obat-obatan yang aman dan ramah lingkungan.

Hasil riset pertanian harus direalisasikan dalam kebijakan negara mendorong para petani meningkatkan produktifitas pertanian mereka. Dalam hal ini, negara harus menciptakan beragam kebijakan yang inovatif untuk memberikan dorongan kepada petani baik berupa pemberian lahan pertanian kepada para petani, pelatihan dan bimbingan pertanian, pembangunan infrastruktur seperti jalan, listrik, sarana air dan irigasi khususnya yang mampu menjangkau wilayah pedesaan. Di samping usaha tersebut, pemerintah juga harus menjamin terserapnya produksi pertanian pada petani dengan harga yang layak.

Ekstensifikasi dilakukan dengan jalan perluasan area pertanian. Untuk merealisasikan program ekstensifikasi pertanian negara harus menggunakan metode hukum-hukum pertanahan, di mana negara mengatur distribusi kepemilikan tanah kepada masyarakat yang mampu mengolahnya menjadi lahan pertanian, mencegah terjadinya monopoli tanah oleh pihak individu dan swasta, mengambil kepemilikan tanah dari orang yang telah menelantarkan tanah lebih dari 3 tahun dan menyerahkan kepemilikannya kepada siapapun yang membutuhkan dan mampu menggarapnya.

Upaya meningkatkan dan menjaga produktifitas pertanian dewasa ini tidak cukup dilakukan hanya dengan intensifikasi dan ekstensifikasi, tetapi juga meliputi upaya melindungi dan menjaga keberlangsungan produksi pertanian. Dalam hal ini efek rumah kaca (*green house*) berupa perubahan iklim sudah tidak dapat dielakkan lagi sebagai akibat industri kapitalis yang sembrono dan tidak bersahabat dengan lingkungan. Untuk itu Negara khilafah harus mengatur dan menciptakan industri, sumber energi dan system transportasi yang ramah lingkungan.

Kebijakan Ketahanan Pangan Islam di Indonesia

Islam memerintahkan bahwa pemerintah adalah pelayan rakyatnya, bahkan digambarkan pemimpin itu seperti penggembala yang akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah atas yang digembalakan.

Di dalam Islam, yang menguasai hidup orang banyak tidak boleh dimiliki, dikuasai dan dikelola oleh perorangan atau kelompok maka pemerintahlah yang wajib menyediakan untuk kepentingan semua rakyat. Secara prinsip maka bisa digambarkan secara teknis bagaimana seharusnya pengelolaan beras khususnya di Indonesia :

Badan Ketahanan Pangan atau lembaga yang ditunjuk pemerintah seharusnya memiliki pola rencana dari target yang sudah jelas dari data-data potensi yang ada untuk membuat pelayanan terhadap masyarakat.

1. Pelayanan terhadap masyarakat petani

Pemerintah sudah menetapkan daerah-daerah sentra produksi padi dengan target yang jelas, maka lembaga pemerintah ini akan berupaya semaksimal mungkin dengan pemerintah daerah secara langsung mengarahkan para petani yang lahannya potensial untuk tanaman padi agar menanam padi sesuai program pemerintah. Memberikan teknologi budidaya yang utuh sesuai program pemerintah kepada para petani yang menanam padi dan memberikan kemudahan akses untuk memperoleh sarana dan prasarana budidaya seperti kelancaran pengairan, penanggulangan HPT (Hama dan Penyakit Tanaman) secara terpadu, pemupukan berimbang dan lain sebagainya yang terkait dengan pola budidaya yang ada. Kemudian lembaga ini menjadi tempat pelayanan distribusi langsung pemerintah kepada petani terkait dengan subsidi pemerintah tidak melalui perantara swasta seperti kelompok usaha tani atau unit-unit usaha lain atau dengan kata lain ada setiap petugas dari lembaga ini yang langsung berfungsi sebagai pelayan dan pembina atau ketua dari kelompok tani dengan catatan ada pendapatan yang diberikan oleh pemerintah kepada petugas ini sehingga menutup kemungkinan petugas untuk mencari pendapatan tambahan.

Lembaga pemerintah yang ditunjuk ini juga bertugas memantau atau dan menampung hasil panen petani dengan harga yang sudah ditetapkan dengan perhitungan di atas biaya produksi. Lembaga ini juga bertugas untuk langsung memotong hasil panen untuk zakat pertanian bagi yang muslim dan pajak bagi non muslim. Hasil dari zakat ini dikelola untuk didistribusikan ke fakir miskin, sedangkan pajak langsung masuk ke pemerintah. Lembaga ini juga menyimpan hasil panen dan mendistribusikan ke daerah-daerah secara merata sesuai jumlah penduduk dan kebutuhannya akan pangan khususnya beras.

2. Pelayanan terhadap masyarakat

Lembaga pemerintah ini juga melayani secara langsung pendistribusian beras ke semua rakyat dengan membentuk agen-agen resmi yang telah ditunjuk (pegawai pemerintah) yang bertugas menjual langsung ke masyarakat. Petugas ini digaji langsung sehingga tidak akan memungkinkan mempermainkan harga, keuntungan sepenuhnya dari penjualan masuk ke kas negara.

Inilah salah satu alternatif pilihan yang ditawarkan yaitu pelayanan langsung kepada para petani dan masyarakat umum terutama untuk kebutuhan pokok khususnya beras. Pola seperti ini akan menutup para pelaku-pelaku bisnis yang dengan sengaja untuk mengeruk keuntungan dari penderitaan masyarakat. Di sisi yang lain, pertanian Indonesia ke depan akan semakin mantap karena langsung dilayani oleh pemerintah. Teknologi budidaya akan berkembang cepat sesuai teknologi yang telah dikembangkan oleh pemerintah karena transfer teknologinya cepat dan akan tepat sasaran, kemudian teknologi tersebut akan terintegral dalam satu pola yang inovatif dan produktif karena melibatkan semua komponen yang ada di departemen pertanian untuk menangani secara langsung setiap permasalahan yang muncul di tingkat petani. Harga akan stabil karena langsung dikontrol pemerintah mulai dari penyediaan hingga pendistribusiannya sehingga tidak ada pihak swasta yang bias menimbun beras.

Ketika kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi dan didapat secara murah akan meningkatkan kemakmuran dan memunculkan usaha-usaha tani yang produktif yaitu pengembangan pertanian di luar kebutuhan pokok masyarakat. Masa depan pertanian Indonesia akan menjadi barometer dan sekaligus pengeksport terbesar dari bidang pertanian. Di pihak swasta (individu, kelompok atau perusahaan) mereka akan terpacu untuk mengambil peran di bidang sekunder (di luar kebutuhan pokok) sehingga akan memacu kemajuan bidang pertanian yang selama ini belum termaksimalkan.

Penutup

Indonesia sebagai negara berkembang yang jumlah penduduknya cukup besar harus menghindari ketergantungan yang terlalu besar terhadap impor beras. Hal ini karena akan banyak mengandung resiko terhadap keterbatasan devisa negara, melemahnya nilai rupiah terhadap dolar, ketidakstabilan harga beras di pasar dunia, sehingga akan mengakibatkan rapuhnya ketahanan pangan nasional.

Pemberian ijin impor kepada pihak swasta agar dikaji ulang. Sebaiknya beras dilakukan proteksi, sehingga impor beras dikendalikan oleh pemerintah agar masyarakat tidak menjadi objek mencari keuntungan.

Menurunnya produksi beras dengan konsekuensi mengimpor beras dalam jumlah besar dan berkelanjutan merupakan persoalan yang berpotensi besar terhadap ancaman ketahanan pangan nasional. Kegagalan dalam penyediaan beras sebagai bahan pangan strategis akan menimbulkan implikasi sosial dan politik yang bernilai sangat mahal, seperti yang telah terjadi pada tahun 1998.

Dengan sumber alam dan potensi kekuatan kelembagaan perekonomian masyarakat pedesaan tidak selayaknya jika bangsa Indonesia menggantungkan kebutuhan berasnya pada pasar luar negeri secara berkelanjutan.

Upaya untuk meningkatkan produksi beras dapat dilakukan melalui peningkatan produktivitas dan peningkatan indeks penanaman menjadi tiga kali, memberikan insentif kepada petani seperti menaikkan harga dasar gabah dan menurunkan harga saprotan (benih, pupuk, dan pestisida), mengendalikan serangan hama/penyakit dan memperbaiki manajemen pasca panen sehingga kehilangan hasil gabah dapat ditekan dan penurunan rendemen beras dapat diperkecil.

Daftar Pustaka :

- Amang, Bedu dan M.H. Sawit. 2001. **Kebijakan Beras dan Pangan Nasional. Pelajaran dari Orde Baru dan Orde Reformasi**. Edisi Kedua, Penerbit IPB Press, Bogor.
- Erwidodo, A.H. Malian, C. Saleh, S. Mardianto dan A.K zakaria. 1999. **Pengkajian Pengamanan Harga Dasar Gabah dan Penerapan Kebijakan Tarif Impor Beras. Dalam Analisis dan Perspektif Kebijaksanaan Pembangunan Pasca Krisis Ekonomi**. Monograph Series No. 20. T. Sudaryanto, I. W Rusastra, E. Jamal (Eds). Puslit Sosek Pertanian. Badan Litbang Pertanian. Hal. 257-268
- Muttaqin, Hidayatullah. 2007. **Beras dan Politik Pangan Negara Khilafah**. [http://Corpusalienum.multiply.com/journal/item/103/Konsep Ketahanan Pangan dalam Islam](http://Corpusalienum.multiply.com/journal/item/103/Konsep_Ketahanan_Pangan_dalam_Islam). Diakses tanggal 6 Juni 2008 pk. 12.48 WIB
- Notonagoro, Aryo. 2007. **Liberalisasi Perberasan Menyengsarakan Rakyat**. [http://Corpusalienum.multiply.com/Journal/Item/103/Konsep Ketahanan Pangan dalam Islam](http://Corpusalienum.multiply.com/Journal/Item/103/Konsep_Ketahanan_Pangan_dalam_Islam). Diakses tanggal 6 Juni 2008 pk. 12.30 WIB
- Lassa, Jonatan. 2006, **Politik Ketahanan Pangan Indonesia 1950-2005**. http://zef.de/module/register/media/3ddf_politik_ketahanan_pangan_Indonesia.201950-2005.pdf. Diakses tanggal 6 Juni 2008 pk. 13.00 WIB
- Safuan, Sugiharso. 1997. **Ketahanan Pangan dan Gejolak Moneter dalam Penduduk, Pangan dan Ancaman Hantu Malthus**. Warta Demografi No. 3/ 1997. Lembaga Demografi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia
- Sapuan. 1999. **Perkembangan Manajemen Pengendalian Harga Beras di Indonesia 1969-1998**. Agro Ekonomika (1): 29-37
- Sawit, M.H.1998. **Harga Beras di Dalam dan di Luar negeri**. Republika, 28 Januari 1998.
- Simatupang, P. 2000. **Anatomi Masalah Produksi Nasional dan Upaya Mengatasinya**. Seminar Nasional Perspektif Pembangunan Pertanian dan Kehutanan Tahun 2001 Ke Depan. Bogor 9-10 November 2000. Puslit Sosek Pertanian, Bogor.

Simatupang, P. Nizwar Syafa'at, Erwidodo, dan A.H Malian. 1999. **Penentuan Tarif Impor Beras: Alternatif Pengamanan Kebijakan Pembangunan Pasca Krisis Ekonomi.** Monograph Series No.20. T. Sudaryanto, I W Rusastra, E. Jamal (Eds). Puslit Sosek Pertanian. Badan Litbang Pertanian. Hal 247-256

Supadi. 2004. **Ketahanan Pangan dan Impor Beras Berkelanjutan.** Puslit Sosek Pertanian. Badan Litbang Pertanian. Icaserd Working Paper No. 45